

# Segregasi Ruang Sosial Antara Pendatang dengan Penduduk Asli pada Permukiman Perkotaan di Denpasar

Syamsul Alam Paturusi  
Universitas Udayana  
Email: syamsul@unud.ac.id

## Abstract

This article aims to determine the socio-space segregation between newcomers and natives having the same genealogy in Denpasar, Bali. The study was focused on three aspects: determining the factors that influence the occurrence of socio-space segregation; the factors that most influence the shape of such interactions; and its influence on the spatial. The approach taken was descriptive qualitative, through verification at Housing Complex Padang Galeria, West Denpasar. The final result was: bigotry against region of origin, both the migrants and natives became the forerunner to the segregation of socio-space; the most influential factors for the socio-space segregation was customary (*pakraman*) village institution itself that binds its members in a territorial unity, spiritual and member togetherness; socio-space segregation phenomena were abstract when transformed into mental maps will show multinodes in the sub-villages in the region of *pakraman* village.

**Keywords:** socio-space segregation, *pakraman* village, resident mobility, resident interaction

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya segregasi ruang-sosial antara pendatang dengan penduduk asli yang bergeanologis sama di Denpasar, Bali. Kajian difokuskan pada tiga hal, yaitu: mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya segregasi ruang-sosial; faktor yang paling berpengaruh terhadap bentuk interaksi tersebut; dan pengaruhnya terhadap spasial. Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, melalui verifikasi di Kompleks Perumahan Padang Galeria, Denpasar Barat. Hasil akhir yang didapatkan adalah: fanatisme terhadap daerah asal, baik bagi pendatang maupun penduduk asli menjadi cikal bakal terjadinya segregasi ruang sosial; faktor yang paling berpengaruh terjadinya segregasi ruang sosial adalah lembaga desa *pakraman* itu sendiri yang

mengikat warganya dalam suatu kesatuan teritorial, spiritual dan kebersamaan warga; fenomena segregasi ruang-sosial yang bersifat abstrak bila ditransformasikan dalam bentuk peta mental akan memperlihatkan simpul-simpul konsentrasi (*multinodes*) pada *banjar-banjar* dalam wilayah desa *pakraman*.

Kata kunci: Segregasi ruang-sosial, desa *pakraman*, mobilitas penduduk, interaksi penduduk

## 1. Pendahuluan

Era globalisasi mendorong mobilitas penduduk antarwilayah semakin tinggi, yang menurut Appadurai (1996) salah satunya dicirikan dengan mobilitas lintas budaya dan tanpa batas (*ethnoscape*). Bentuk mobilitas penduduk (*population movement*) bisa bersifat temporer dan permanen (Short, 1984; Mantra, 2000).

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk menurut Lee (1985) adalah faktor pendorong (*push*) dan penarik (*pull*). Pada umumnya termasuk di Bali didorong oleh faktor ekonomi (Sudibia, 2011). Meski demikian, tidak serta merta seseorang atau kelompok dengan mudahnya berpindah tempat hanya dengan faktor pendorong dan penarik, ada pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor rintangan-antara (*intervening obstacles*) dan faktor individu. Setelah semua faktor dipertimbangkan dengan matang barulah seseorang memutuskan untuk berpindah/tetap di daerah asal.

Rintangan-antara selalu ada, namun tidak selalu menjadi faktor penghalang. Rintangan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada masing-masing individu dan budaya. Faktor dalam pribadi inilah yang mempunyai peranan terbesar. Salah satu dari sekian banyak faktor individu ini adalah faktor budaya masyarakat. Di Bali, menurut Suwondo (2011), rintangan utama masyarakat untuk berpindah tempat adalah keterikatan dengan daerah asal atau tempat kelahirannya. Identitas sosial budaya yang melekat pada tempat kelahiran dikhawatirkan akan hilang bila mereka bermigrasi. Berbeda dengan etnik Minang dan Bugis-Makassar, etnik Bali memiliki keterikatan yang lebih kuat terhadap tanah kelahirannya.

Dengan demikian bagi masyarakat Bali, ada dua kekuatan tarik menarik sebelum membuat keputusan bermobilitas, yaitu di satu sisi ada keinginan untuk meninggalkan daerah asal (sentrifugal),

di sisi yang lain adanya keterikatan dengan tanah kelahiran (sentripetal). Keputusan akhir yang diambil adalah merupakan *resultante* keduanya yang menurut Wiratmaja (2002) adalah dalam penentuan preferensi pilihan lokasi tujuan bermukim yang dekat dengan daerah asal. Kabupaten Badung dan Denpasar merupakan preferensi pilihan bermukim, hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan penduduk kedua kabupaten tersebut 75 % akibat migran (Ardin Bali, 2011). Hal ini juga didukung dengan kemajuan sarana dan prasarana transportasi. Pilihan mobilitasnya dapat dengan cara ulang-alik (*commuting*) atau di Bali disebut *ngajag* atau mondok (*circulation*) (Rustariyuni, 2013). Kedua pilihan mobilitas ini merupakan solusi terbaik bagi masyarakat Bali, dapat mencari nafkah diluar daerah asal, namun tetap dapat melaksanakan kewajiban sosial (*ngayah*) di daerah asal.

Mobilitas penduduk membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara penduduk pendatang dan yang didatangi (*host*). Berbagai penelitian tentang interaksi sosial antara pendatang dengan penduduk asli diwarnai dengan ketegangan-ketegangan bahkan konflik, antara lain kasus Kalimantan Tengah antara etnik Dayak dengan Madura Tahun 2011 (Arbain, 2015); konflik di Lampung Selatan antara etnik Lampung dengan Bali 27-28 Oktober 2012 dan yang terbaru antara etnis pendatang dengan etnis Papua 17 Juli 2015. Terlepas dari latar belakang pemicunya, kerawanan ini lebih berpeluang terjadi antara etnis yang berbeda. Bagaimana jika antara pendatang dengan penduduk asli bergenealogis sama? Hasil penelitian migran sirkuler yang bergenealogis sama di Padang (Amizeko, 2014) dan Makassar (Suriani, 2014) menunjukkan hubungan desegregasi. Tipologi migrasi di Badung dan Denpasar pada khususnya terjadi interaksi dominan bergenealogis sama, sebagai konsekuensi pilihan migran Bali yang tidak memilih keluar Bali. Memang sampai saat ini hubungan interaksi mereka nyaris tidak ditemui masalah yang berarti.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apakah interaksi yang bergenealogis sama, seperti kota lain di Indonesia sama dengan yang terjadi di Denpasar atau Bali pada umumnya? Pertanyaan yang mengusik ini bersumber dari tesis Lefebvre (1974) yang mengatakan bahwa:

Ruang yang dibentuk akibat interaksi penduduk, sesungguhnya semuanya adalah ruang sosial (*conceived space*), ....apa yang terlihat secara kasat mata dalam bentuk ruang fisik (*perceived space*), bisa tidak sama dengan ruang-sosialnya”

Untuk memahami interaksi antara pendatang dengan penduduk asli yang bergenealogis sama ini tidak ada cara lain kecuali memahami ruang sosial yang dibentuknya. Sejalan dengan ungkapan Levebfre (1974) yang menyatakan bahwa *conceived space* tidak dapat dipersepsi tanpa memahaminya terlebih dahulu di dalam pikiran. Merangkai berbagai elemen untuk membentuk suatu “kesatuan yang utuh”.

Untuk itu hal pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana bentuk interaksi sosial yang terjadi apakah bersifat segregasi atau desegregasi. Selanjutnya adalah mengetahui faktor yang dominan penyebab bentuk interaksi sosial tersebut dan yang terakhir adalah bagaimana ungkapan ruang sosial yang bersifat abstrak tersebut dalam spasial.

Pemahaman terhadap “ruang-sosial” pada suatu wilayah sangat berguna sebagai masukan informasi bagi perencana dan penentu kebijakan pembangunan. Dari informasi inilah menurut Rapoport (1977) jika disandingkan dengan data “ruang-fisik” dan “ruang-ekonomi” para perencana kota dapat menentukan tata fisik suatu kota (*urban form*) secara optimal, dan bagi penentu kebijakan, informasi ini akan memudahkan dalam alokasi perencanaan kebutuhan ruang dan fasilitas perkotaan.

Fenomena keseragaman wajah kota di Indonesia saat ini, tidak lepas dari absennya pemahaman atau identifikasi ruang-sosial masyarakat. Para perencana tidak mampu memotret dan mengejawantahkan *genius-loci* keunikan setiap wilayah dalam perencanaan kota. Padahal bentuk kota (*urban form*) pada hakekatnya adalah perwujudan berbagai kekuatan sosial masyarakat perkotaan, inilah yang membedakan corak dan karakter antara suatu kota dengan kota lainnya (Lynch, 1984; Agnew, 1984).

Dalam konteks penataan ruang, hendaknya “ruang fisik” dan “ruang sosial” dilihat sebagai suatu kesatuan (*comprehensive*). Data dan informasi yang berkaitan dengan “ruang-fisik” di Denpasar sudah banyak tersedia dengan berbagai media, proses pengumpulan data relatif lebih mudah karena sifatnya kasat mata (nyata, konkret dan terukur). Di sisi lain data yang menyangkut informasi ruang-

sosial (*socio-space*), sifatnya sangat abstrak karena berkaitan dengan norma, pikiran (*mind*), idea dan simbolik. Karena sifatnya abstrak maka unsur-unsur dan parameternya sangat kompleks dimana informasi dan data yang tersedia masih sangat minim dan terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengisi bagian kecil kekosongan informasi ini (terbatas hanya mengamati interaksi interaksi antara masyarakat yang bergenealogis sama). Diharapkan bagian- bagian lainnya dapat diisi dengan penelitian berikutnya, sehingga secara akumulatif nantinya dapat diperoleh secara optimal informasi dan tipologi Ruang sosial di Denpasar. Penelitian-penelitian tersebut, misalnya, penelitian interaksi multietnik di Denpasar, atau interaksi antara migran dari luar dengan penduduk asli, atau migran sirkuler Bali dengan migran dari luar.

Untuk memotret fenomena ini secara faktual dibuat suatu simulasi kajian pada salah satu lokasi permukiman di Denpasar sebagai objek studi kasus. Lokasi kajian adalah Kompleks Perumahan Padang Galeria, Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat. Perumahan ini hanya berjarak 2 Km dari Legian-Seminyak (sentra pariwisata dan strategis bagi tempat kerja bagi pendatang). Perumahan ini dibangun tahun 1994 oleh pengembang PT Bali Galeria yang terdiri dari 3 blok: Padang Galleria I, II dan III dengan jumlah 150 kepala keluarga (655 jiwa). Tujuh puluh delapan KK (52%) berasal dari Bali dan 80 % bekerja berkaitan dengan dunia pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wilayah Padang Sambian Klod memiliki satu desa *pakraman* yaitu Desa *Pakraman* Kerobokan yang membawahkan 11 *banjar*, yaitu: (1). Br. Teges; (2) Br. Tegal Buah; (3) Br. Abasan;(4) Br. Tegal Lantang Kaja;(5) Br. Tegal Lantang Klod;(6) **Br. Padang Sumbu Kaja**; (7) **Br. Padang Sumbu Tengah**; (8) Br. Padang Sumbu Klod; (9) Br. Batu Bolong; (10) Br. Jaba Pura;(11) Br. Umadui. Banjar no. 6 dan 7 adalah banjar yang membawahkan Perumahan Padang Galeria, yaitu Banjar Padang Sumbu Kaja (meliputi Padang Galeria I dan II) dan Banjar Padang Sumbu Tengah (meliputi Padang Galeria III)

Dalam artikel ini, banyak disinggung mengenai ruang-sosial. Ruang-sosial bisa dipahami dalam berbagai konteks dan pengertian, misalnya ada yang mengartikan ruang-sosial identik dengan ruang public (*public space*) sebagai lawan dari ruang privat (Carmona, 2008). Namun dalam artikel ini yang dimaksudkan dengan "ruang sosial" adalah bukan ruang dalam arti fisik dengan konsekuensi

sosiologis, melainkan sebuah fakta sosiologis yang membentuk ruang (Fearon, 2004). Gagasan asli mengenai "ruang sosial" berakar dari tulisan Georg Simmel (1913) dalam "*The Sociology of Space*" yang kemudian dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya..

## **2. Konsep Segregasi Ruang Sosial Permukiman Perkotaan**

Segregasi ruang sosial adalah pengelompokan dan atau pembagian zonasi ruang berdasarkan etnik, bangsa, profesi. Fenomena ini umum terjadi pada permukiman perkotaan, misalnya pengelompokan masyarakat berkulit hitam di Brooklyn atau Hispanic pada kota-kota di Amerika dan Amerika Latin (Noorlos, 2015), atau pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat sosial dan kasta di New Delhi (Dupont, 2004).

Pengelompokan ruang sosial pada kota-kota di Indonesia juga telah berlangsung lama, misalnya pada pusat-pusat kerajaan (kraton) ada hirarki permukiman berdasarkan derajat sosial masyarakat, dari zona pemukiman masyarakat biasa, kerabat kerajaan dan pangeran (Wirjomartono, 1995; Santoso, 2008). Di era kolonial pengelompokan dan pemisahan ruang sosial terlihat dengan adanya zona pribumi, pecinan dan kauman; di Jakarta misalnya ada kelompok-kelompok permukiman: kampung Melayu, kampung Bali, kampung Makassar, Manggarai dan seterusnya.

Di Denpasar, fenomena segregasi ruang sosial masa kolonial ditandai dengan adanya zona-zona permukiman: kampung Jawa (di ujung utara Jalan Kartini), kampung Arab (Jalan Hasanuddin dan sekitarnya), kampung Bugis (Kepaon dan Serangan) dan pecinan (Jalan Gajahmada, Jalan Kartini). Di era modern segregasi ruang sosial di Denpasar bukan hanya berdasarkan pengelompokan etnis dan kebangsaan, seperti pada kota-kota lain di Indonesia juga ditemui pengelompokan permukiman berdasarkan profesi, misalnya perumahan dosen di Lumintang dan di Manguntur Batu Bulan, asrama militer di kawasan Sudirman.

### **2.1 Segregasi Ruang-Sosial: Dekat tetapi tidak Menyatu**

Secara umum tulisan dan penelitian tentang interaksi sosial telah banyak dilakukan para sosiolog, sebut saja Gillin dan Gillin (1942 versi digital 2006); Young dan Mack (1959); Broom dan Selznick (1984); Homans (1991); Macionis (2002); Soekanto (2012). Hasil penelitian ini secara umum membagi interaksi sosial menjadi

dua kelompok yaitu bentuk interaksi sosial **asosiatif**, dan bentuk interaksi sosial **disosiatif**. Yang termasuk interaksi sosial asosiatif adalah: kerja sama (*cooperation*), akomodasi (*accomodation*), asimilasi (*assimilation*) dan akulturasi (*acculturation*). Sedangkan Interaksi Sosial Disosiatif adalah: persaingan (*competition*), kontraversi dan pertentangan/konflik sosial (*conflict*). Berdasarkan pembagian interaksi ini, dalam konteks interaksi penduduk di Denpasar nampaknya para pendatang (*krama tamiu*) dengan penduduk asli (*wed*) cenderung kearah interaksi asosiatif (kerjasama, akomodasi, asimilasi bahkan akulturasi). Hal ini diindikasikan dengan kecilnya gesekan antara kedua kelompok tersebut baik di Denpasar maupun di Bali pada umumnya, walaupun ada sifatnya sangat kasuistis.

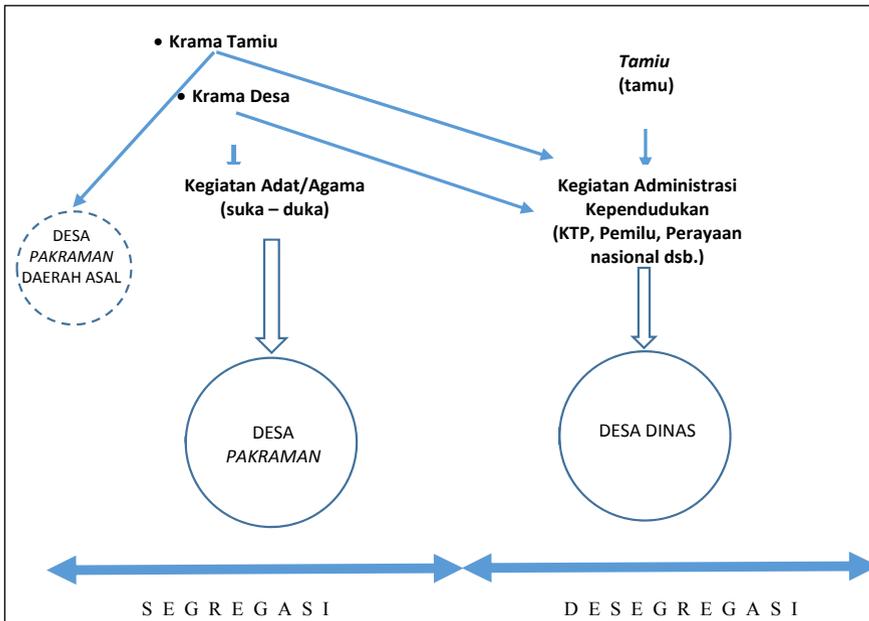
Bentuk interaksi ini belum dapat menunjukkan intensitas atau kedalaman interaksi antara kedua kelompok tersebut. Menurut Teori Dominasi Sosial bahwa manusia memiliki predisposisi dasar untuk membentuk hirarki dalam masyarakat (Sidanius & Pratto, 2001). Selanjutnya teori tersebut menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hirarki sosial. Dalam konteks hubungan antara pendatang dengan penduduk asli, ada kecenderungan pihak penduduk asli menempatkan dirinya lebih superior (dominan) karena merasa memiliki kekuasaan otoritas, sumberdaya dan penguasaan terhadap teritorialitas. Mekanisme pembentukan kelompok dominan terhadap subordinat ini bisa dicermati melalui tiga skenario, yaitu: (1) *legitimizing myths*; (2) diskriminasi institusional (lembaga); dan (3) diskriminasi individu. Di Bali nampaknya mekanisme diskriminasi institusional (lembaga) lebih dominan dibanding dua faktor lainnya yang terlihat dari keputusan Majelis Desa *Pakraman* Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung Pertama Majelis Desa *Pakraman* (MDP) Bali, tertanggal 3 Maret 2006. Keputusan ini mengatur kedudukan antara pendatang dengan penduduk asli sebagai berikut:

1. *Krama Desa* adalah penduduk beragama Hindu yang *mipil* / tercatat sebagai *krama* di salah satu desa *pakraman*
2. *Krama Tamiu* adalah penduduk beragama Hindu yang tidak *mipil* / tercatat sebagai *krama* di desa *pakraman* dimana berdomisili tetapi tercatat sebagai *krama* di desa *pakraman* asal kelahirannya
3. *Tamiu* (tamu) adalah penduduk yang tidak beragama Hindu yang tinggal di desa *pakraman*.

Dari ketiga pengkategorian ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya pembentukan jarak sosial (*social distance*) antara pendatang dengan penduduk asli yang selanjutnya menjadi salah satu faktor yang memperkuat terjadinya segregasi ruang sosial.

Meski demikian, segregasi ruang sosial ini hanya terjadi dalam lingkup kegiatan yang berkaitan dengan adat (*desa pakraman*). Kegiatan yang berkaitan dengan sistem kelembagaan pemerintahan nasional diwadahi dalam *desa dinas*, di mana kesetaraan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk asli adalah sama, layaknya seperti daerah lain di Indonesia.

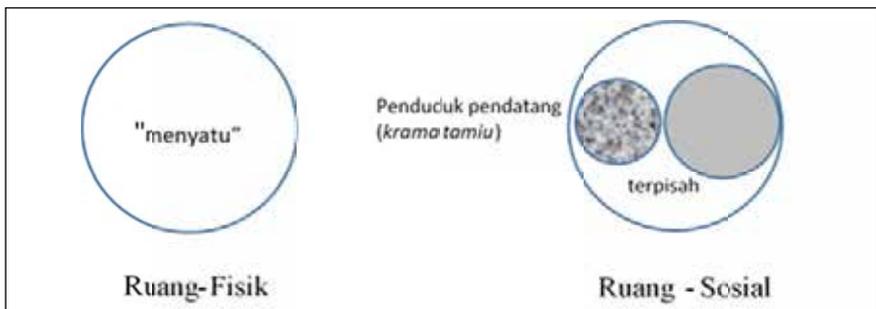
Kedua perangkat kelembagaan ini (*desa pakraman* dan *desa dinas*) diakui secara legal formal di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Bab III dan Bab XIII. Keduanya memiliki pembagian tugas masing masing, sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dalam tugas dan kewenangan (Lihat Gambar 1).



**Gambar 1. Hubungan antara Jenis Kegiatan Penduduk, Desa (Pakraman, Dinas) dan Bentuk Interaksi**

Dari Gambar 1 terlihat bahwa jenis kegiatan penduduk antara tiga pelaku utama (*tamiu*, *krama desa* dan *tamiu*) tergambar dengan jelas letak perbedaannya, baik dalam bentuk kegiatan maupun teritorialnya. Jumlah arah panah pada satu titik, dapat mengindikasikan sentralitas fungsional di titik tersebut. Dari sana terlihat desa dinas masih memperlihatkan dominasinya sebagai pusat orientasi dari ketiga pelaku utama. Sedangkan yang berkaitan dengan kegiatan adat/agama dan suka/duka hanya tertuju bagi *krama desa* di desa *pakraman* bersangkutan, dan bagi *krama tamiu* di desa *pakraman* tempat asalnya.

Keterikatan dengan daerah asal bagi pendatang yang begitu kuatnya, menganggap bahwa permukiman baru mereka di perkotaan selalu dipandang sebagai “daerah transit” yang bersifat sementara. Demikian halnya dengan penduduk asli memandang para pendatang (dari manapun asalnya) sebagai “outsider”. Fenomena interaksi ini dalam konteks spasial dapat dibaca dan dimaknai bahwa secara “ruang-fisik”, antara pendatang (*krama tamiu*) dengan penduduk asli (*wed*) “menyatu” karena secara kasat mata mereka bertetangga, berdampingan dan saling berinteraksi. Namun bila dilihat dari sudut pandang ruang-sosial, mereka “terpisah” (*segregation*), seperti tampak pada Gambar 2.



**Gambar 2 Ruang Fisik dan Ruang Sosial antara Pendatang dengan Penduduk Asli di Bali**

Di beberapa lokasi permukiman di Denpasar, desa *pakraman* setempat memberlakukan kewajiban bagi seluruh pendatang (*krama tamiu* dan *tamiu*) untuk membayar yuran bulanan yang berkisar antara Rp.5000 – Rp. 15.000/bulan (jumlah ini sangat relatif tergantung dari *banjar* masing masing). Selain untuk menambah kas banjar juga dimaksudkan sebagai upaya mengundang kepedulian

para pendatang untuk menumbuhkan rasa memiliki lingkungan permukiman dimana mereka tinggal. Meski demikian, aturan ini tidak berlaku umum, tergantung dari peraturan (*awig-awig*) setiap desa *pakraman*. Di Kompleks Perumahan Padang Galeria misalnya, dua *banjar* yaitu *Banjar* Padang Sumbu Kaja dan Padang Sumbu Tengah yang membawahkan perumahan ini tidak mewajibkan yuran bagi penghuni. Kalaupun ada sangat insedental dan sifatnya sukarela.

Dari 78 KK yang beretnis Bali di kompleks perumahan hanya ada ada 3 kepala keluarga (KK) yang ikut bergabung sebagai *krama desa*, 1 KK bergabung dengan *Banjar* Padang Sumbu Tengah, yaitu dr. Ken Wirasandi, 2 KK lainnya bergabung dengan *Banjar* Padang Sumbu Kaja, yaitu Komang Karios dan Made Sudana. Dr. Ken dan Komang Karios bersaudara kandung berasal dari *Banjar* Tainsiat Denpasar, sedangkan Made Sudana beristerikan penduduk asli *Banjar* Padang Sumbu Kaja. Dari kenyataan ini terlihat bahwa persentasi penghuni perumahan yang ikut *krama desa* sangat kecil sekali (0,03%), artinya sekitar 99% memilih berorientasi ke daerah asalnya. Dalam konteks ruang-sosial angka ini menunjukkan tingginya disparitas ruang-sosial antara pendatang dengan penduduk asli.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya segregasi ruang-sosial ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal sebagaimana telah dikemukakan di pendahuluan bahwa "keterkaitan" dengan daerah asal bagi pendatang yang begitu kuatnya. Hal ini berkaitan dengan sanksi sosial masyarakat bagi anggota desa *pakraman* baik dalam hal suka maupun duka. Intensitas kehadiran menjadi salah satu ukuran ketaatan. Meskipun akhir akhir ini beberapa desa *pakraman* di Bali bersifat fleksibel terhadap aturan kehadiran anggotanya, misalnya dengan kompensasi uang pengganti kehadiran (*pengampel*). Adanya keterkaitan dengan daerah asal ini membuat para migran di perkotaan menganggap bahwa tempat tinggal barunya di Denpasar dianggap hanya sementara dan transit. Dengan demikian keterikatan emosional dan kulturalnya hanya bersifat *artificial*.

Dipihak lain, faktor eksternal yang mendorong adanya segregasi ruang-sosial antara lain adalah adanya dualisme kelembagaan ditingkat desa (desa dinas dan desa *pakraman*) yang meskipun secara tidak langsung telah membuat "pengelompokan" antara

masyarakat. Dikotomi segregasi ruang sosial ini berlanjut dengan Hasil-Pesamuan Agung Pertama MDP Bali, tertanggal 3 Maret 2006 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang melahirkan pembagian kelompok penduduk pendatang dan penduduk asli: *krama desa*, *krama tamiu*, dan *tamiu*. Pengelompokan ini semakin memperkuat sikap penduduk asli terhadap para pendatang, bahwa bagaimanapun mereka hanyalah “tamu”, seperti yang dikemukakan oleh dr. Ken:

“...ya...meskipun saya sudah menjadi anggota *krama* desa di Banjar Padang Sumbu Tengah, saya tidak mungkin bisa menjadi *klian* disini....paling tinggi menjadi *sinoman*....tidak tahu kalau nanti anak saya mungkin bisa.....(wawancara 5 Juli 2016 di ruang prakteknya).

Hanya perlu diingatkan kembali bahwa fenomena ini bukan menjustifikasi atas nilai baik-buruk terhadap suatu tatanan masyarakat, tetapi lebih memotret realitas yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Diskursus segregasi dan desegregasi ruang-sosial hanya bertujuan untuk memetakan dinamisme masyarakat yang justru memberikan gambaran corak karakter dan pembeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain khususnya di perkotaan di Indonesia. Informasi ini sangat penting bagi perencana kota dan pembuat keputusan dalam membuat suatu kebijakan, misalnya dalam masyarakat yang berpola segregatif dan desegregatif tentunya memiliki strateginya masing masing dalam pengalokasian sumberdaya dan kebutuhan ruang.

Penelitian penelitian sebelumnya, misalnya yang dilakukan oleh Noorlos (2015) dan Dupont (2004) dan di dalam negeri Wiryomartono (1995); Santoso (2008) menunjukkan bahwa segregasi ruang sosial adalah fenomena umum yang terjadi di perkotaan. Perlu juga diingat pendapat Peach (2012) mengenai hal ini:

*“not all segregation is enforced and not all segregation is unwanted. Nor is segregation only between the majority and the minorities. Minorities also segregate themselves from each other.*

Pemicu dan objek segregasinya saja yang membedakannya antar suatu kota dengan kota lainnya. Dalam Teori Dominansi Sosial menyebutkan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hirarki sosial (Sidanius & Pratto, 2001).

## 2. 2 Lembaga Adat: Fanatisme atau Fantasisme

Sangat sulit bagi pengamat luar untuk memahami fenomena segregasi ruang-sosial yang terjadi di Bali. Bagaimana mungkin masyarakat yang bergenealogis sama (etnis, kepercayaan dan bahasa yang sama) bisa tercipta segregasi ruang sosial yang begitu besarnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian 1 sebelumnya. Jika di kota lain, masyarakat pendatang tinggal dan menetap pada suatu kawasan yang penduduk aslinya bergenealogis sama, maka yang tercipta adalah desegregasi ruang sosial. Meskipun diakui bahwa segregasi bisa terjadi dari pemicu lain seperti perbedaan profesi pekerjaan, tingkat pendidikan dan perbedaan klas sosial lainnya.

Untuk memahami ini, kembali merujuk pada konsep mobilitas penduduk yang menurut Mantra (2000) dipengaruhi oleh dua kekuatan besar yaitu dorongan gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Sentrifugal adalah dorongan bagi penduduk untuk keluar dari desanya akibat berbagi kondisi desa, misalnya terbatasnya lapangan pekerjaan di bidang pertanian dan non pertanian. Sedangkan kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang menahan penduduk untuk tetap menetap di desa atau daerah asal, misalnya keterikatan pada adat dan tanah leluhur. Kedua kekuatan ini saling tarik menarik, dan pada akhirnya memberi solusi bagi masyarakat Bali untuk migrasi secara sirkuler dengan cara memilih daerah tujuan bekerja di kota-kota Bali sendiri (tidak keluar pulau). Daya tarik pulang ke daerah asal ini juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh kondisi tempat tujuan bermukim diperkotaan yang menganggap mereka tidak lebih sebagai pendatang (*krama tamiu*) bahkan sekalipun menjadi *krama desa*, hak hak mereka tetap terbatas (wawancara dengan dr.Ken, 5 Juli 2016).

Dengan demikian kekuatan daerah asal yang terwujud dalam desa *pakraman*, begitu besarnya. Desa *pakraman* ibaratnya seperti "negara kecil" (*small state*) yang memiliki otonomi penuh terhadap spasial (*palemahan*), spiritual (*parhyangan*) dan pengaturan warga "negaranya" (*pawongan*). Meskipun batas batas teritorialnya tidak sepasti dan seterukur ordinatnya dibanding dengan desa dinas (Surpha, 2004). Kalau dianalogikan dalam tatanan kenegaraan desa *pakraman* ini tidak mengenal adanya warganegara ganda. Loyalitas dan kepatuhan warga (*pawongan*) terhadap desa asalnya ini menjadi mutlak. Di Perumahan Padang Galeria ini misalnya, ada *Pura* bagi

warga perumahan. Warga mengadakan sembahyang dan upacara disini, namun itu tidak cukup, mereka tetap kembali ke desa asal masing masing untuk melakukan kembali sembahyang/upacara bersama warga desa asalnya.

Zaman dahulu batas teritorial antara desa *pakraman* satu dengan lainnya ditandai dengan adanya zona antara (*buffer zone*) berupa lahan tidak terbangun (*karang embang/karang bengang*), namun saat ini akibat perkembangan pembangunan, zona tersebut sudah hilang, sehingga batas fisik sudah tidak dapat lagi dikenali. Di Perumahan Padang Galeria misalnya, warga penghuni terbagi atas dua *janjar* yaitu sebagian masuk *Banjar* Padang Sumbu Kaja (Padang Galeria I dan II), dan sebagian masuk *Banjar* Padang Sumbu Tengah (Padang Galeria III). Batas fisiknya hanya jalan lingkungan perumahan yang seolah menjadi garis pembatas teritorial antar *banjar*.

Dengan demikian definisi pendatang dalam konteks hubungan antara desa *pakraman* ini adalah bukan lagi diukur dengan jarak (*distance*), yang penting melintas ke desa *pakraman* lain sudah dianggap pendatang (meskipun jarak rumah hanya sebatas tembok dinding rumah). Konsekuensi logis pelintas batas ini adalah pemberian status: *krama desa*, *krama tamiu* dan *tamiu*. Artinya pendatang dari Gilimanuk dengan pendatang yang hanya “lompat pagar” statusnya sama sebagai “tamu”, tidak ada bedanya.

Tidak ada catatan ataupun penelitian yang bisa memastikan kapan terbentuknya desa *pakraman* (dulu disebut dengan desa adat). Namun ada yang mengatakan bahwa lembaga adat ini sudah ada sejak zaman Bali-Majapahit (Sudantra, tanpa tahun). Sebagai suatu kelompok komunitas kecil (*small community*), dibangun atas prinsip kerjasama antara anggotanya. Prinsip kerjasama ini yang biasa dikenal gotong royong, **bukan** didorong semata mata karena spontanitas untuk berbakti pada sesama. Penelitian-penelitian yang lebih dalam oleh para Antropolog dan Sosiolog tentang masyarakat yang berbentuk *community* kecil belakangan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang melakukan tolong-menolong (*mutual-help*) lebih disebabkan oleh perasaan saling membutuhkan yang ada dalam jiwa warga anggotanya (Yuliatika, 2015). Sistem saling membantu dalam suatu komunitas ini dalam wacana teoritik saintifik disebut dengan *reciprocity* atau *mutual exchange*, sebagaimana ungkapan Becker (1990) berikut:

“...When someone does something for us, we typically feel obligated to do something for them in return, to return the favor”.

Dengan demikian kearifan lokal masyarakat Bali membentuk desa *pakraman* ini didasarkan pada suatu kesadaran penuh bahwa banyaknya kegiatan upacara yang berlangsung dalam komunitasnya tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan anggota masyarakat lainnya. Juga mungkin disadari bahwa efektivitas kerja yang optimal hanya bisa terlaksana dalam suatu organisasi berskala kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip prinsip *Community Base Development* yang menyatakan bahwa skala ruang yang efektif untuk berjalannya model pengembangan pemberdayaan masyarakat hanya bisa dalam skala lingkungan kecil (Sanoff, 1990). Fenomena ini dapat dimaknai bahwa desa *pakraman* ini “tidak terlalu butuh” bantuan dari pihak luar untuk menjalankan seluruh kegiatan di komunitasnya, dengan hanya mengandalkan sumberdaya warganya semuanya akan beres. *Menyambraya* adalah wujud *reciprocity* ala Bali yang mencerminkan hubungan antara warga (*pawongan*) dalam desa *pakraman* yang berlangsung dan teruji sekian abad lamanya (Damayana, 2011).

Dengan pemahaman ini bisa dijawab pertanyaan di awal sub bahasan ini yang mempertanyakan hubungan antara pendatang (*krama tamiu*) dan yang didatangi (*wed*) tidak bisa cair sepenuhnya meskipun bergeonologis sama. Para pendatangpun sangat memaklumi penerimaan masyarakat yang didatangi, karena mereka juga berasal dari desa *pakraman* yang memiliki prinsip aturan yang relatif sama terhadap pendatang. Mereka yang pendatang juga sangat menghormati dan memahami aturan (*awig-awig*) di daerah barunya, sebagaimana di daerah asalnya juga memiliki *awig-awig* yang harus ditaati bagi warga dan pendatang.

Dengan demikian faktor yang paling berperan terjadinya segregasi ruang-sosial antara pendatang (*krama tamiu*) dengan penduduk asli (*wed*) di Bali dan di Denpasar pada khususnya adalah lembaga desa *pakraman* itu sendiri. Terjadinya segregasi ruang sosial tersebut seolah kesepakatan bersama akibat otonomi masing masing desa *pakraman* yang dibangun diatas azas saling menghormati, sehingga konflik hubungan antara *krama tamiu* dengan *wed* nyaris tidak ada, walaupun ada sangat kasuistis.

Sebagai catatan dan renungan bagi desa *pakraman*, bahwa para pendahulu yang menggagas kelembagaan adat ini pasti tidak pernah berpikir dan menyangka bahwa suatu saat di akhir zaman akan

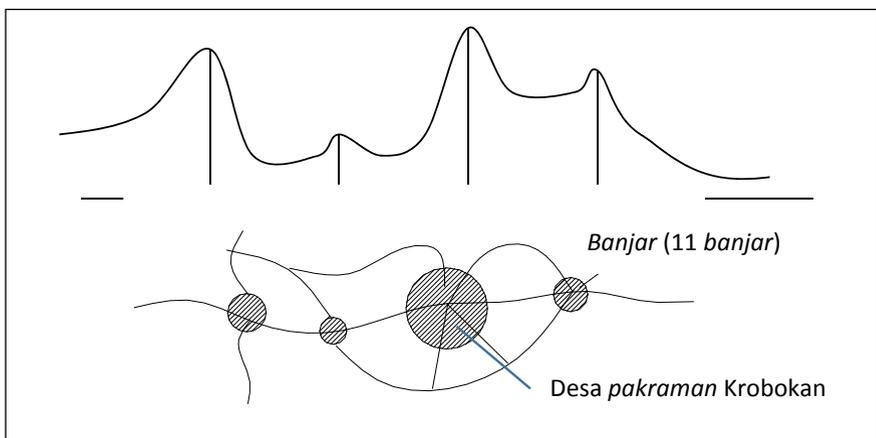
terjadi mobilitas penduduk yang masif dan tanpa batas (*borderless*) baik terhadap warganya yang akan keluar merantau maupun akan kedatangan pendatang yang masuk ke wilayahnya, sehingga tidak pernah memikirkan untuk membuat aturan hubungan masyarakat lintas desa *pakraman*. Kealpaan mengenai kedudukan antara pendatang dengan penduduk asli baru diatur tahun 2006 lalu melalui Pesamaan Agung MDP.

### 3. Banjar Adat sebagai Simpul dan Tenganan

Perlu diingatkan kembali bahwa “ruang-sosial” dalam artikel ini bukan ruang dalam arti fisik dengan konsekuensi sosiologis, melainkan sebuah fakta sosiologis yang membentuk ruang (Fearon, 2004). Fenomena segregasi ruang sosial adalah fenomena yang bersifat abstrak, penuh makna simbolik dan tentu saja tidak kasat mata.

Transformasi fenomena ruang sosial yang bersifat abstrak ke dalam visualisasi imajiner telah banyak dilakukan misalnya oleh Lynch (1960), Lefebvre (1974), Jameson (1991). Juga studi studi terkini yang mengkaitkannya dalam issue “keterbacaan ruang (*legibility*)” (Abdullah Al-Ghamdi dan Al-Harigi, 2015) dan kelompok studi “*mobile city*” (de Waal dan de Lange, 2016).

Dari sudut pandang elemen ruang dalam peta mental dari Lynch (1960), desa *pakraman* dalam wujud *banjar pakraman* dapat dipandang sebagai “*Nodes*” sekaligus “*landmark*” dalam konteks kota (Gambar 3).



**Gambar 3. Banjar sebagai Simpul (*nodes*) Sekaligus Tenganan (*landmark*)**

Pada Gambar 3 peta mental yang bersifat imajiner, *banjar pakraman* digambarkan sebagai puncak-puncak kurva yang mandiri. Sedangkan garis penghubung antar *banjar* adalah jalur jalan (*path*) yang dapat dilihat secara kasat mata. Visualisasi ruang-sosial yang menggambarkan kekuatan-kekuatan pembentuk kota sejalan dengan tesis Lefebvre (1974) sebagai berikut:

*“space is not just ‘out there’ as a mathematical entity or a priori category but always socially produced”*

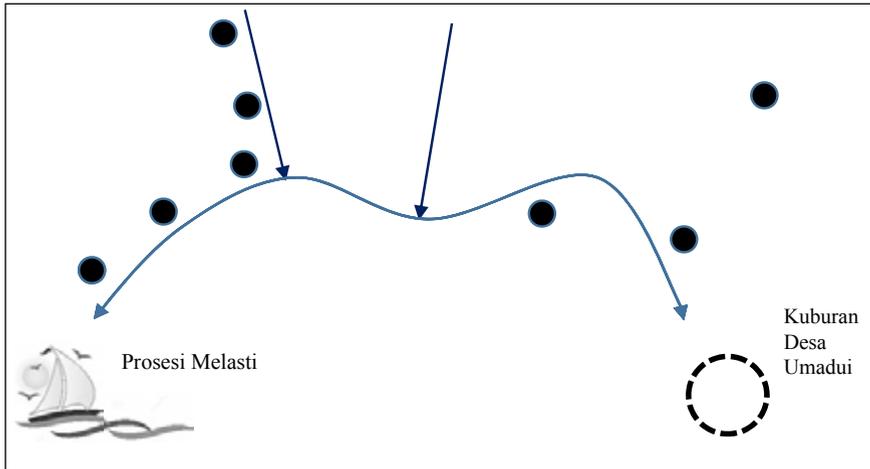
Argumen ini dipertegas lagi oleh seorang ilmuwan yang beraliran postmodern Jameson (1991) yang mengatakan:

*“the cognitive map is a means to cope with societies complexities by bridging ‘objective’ and abstract representations of space, and subjective existential experiences of ‘lived space’.*

Segregasi ruang sosial *banjar pakraman* yang memiliki kemandirian dalam penentuan kegiatan suka duka membawa konsekuensi terjadinya konsentrasi dan penumpukan kegiatan pada simpul-simpul disekitar *banjar* dan koridor jalan (misalnya jalan dari rumah duka ke kuburan desa). Masalah suka-duka yang menjadi bidang tugas banjar meliputi aktivitas-aktivitas pelaksanaan upacara keagamaan yang berhubungan dengan keadaan suka (upacara perkawinan, upacara-upacara yang berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan manusia, dan lain-lain) dan keadaan duka (upacara yang berkaitan dengan kematian, ngaben, dan sebagainya). Koridor jalan yang digunakan dalam prosesi keagamaan, biasanya juga berfungsi sebagai akses utama masyarakat umum, maka kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan, diperparah lagi bila koridor jalan tersebut ditutup seharian. Dampak kemacetan akan merembet ke wilayah yang lebih luas.



seperti dilukiskan dalam Gambar 6 dan 7



**Gambar 7** Jalur Prosesi Keagamaan Koridor Sopotan-Athena-Kunti

Fenomena inilah yang jarang dipotret dalam perencanaan spasial. Yang ada adalah perencanaan yang baku dan bersifat sentralisir yang menyamaratakan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang sesungguhnya sangat beragam. Keunikan dan keragaman budaya setiap wilayah hanya tercermin dan terbatas pada perencanaan skala Arsitektural, namun dalam perencanaan skala meso belum terakomodasi dengan baik. Pembelajaran dari pengetahuan ruang-sosial, baik yang berbentuk segregasi maupun desegregasi adalah mengetahui pemicunya. Segregasi yang pemicunya dari pelapisan sosial ekonomi tentu membutuhkan kebijakan perencanaan yang berbeda dibandingkan dengan pemicu yang berakar pada budaya seperti pada kasus di Bali.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, secara kasat mata hubungan antara para pendatang (*krama tamiu*) dengan penduduk asli (*wed*) di Perumahan Padang Galeria, Denpasar, menyatu dengan baik dalam hal bertetangga dan hubungan sosial lainnya, namun dalam konteks ruang sosial mereka tersegregasi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya segregasi ruang sosial antara pendatang dengan penduduk asli adalah faktor internal: baik pendatang maupun penduduk asli

masing masing memiliki fanatisme terhadap daerah asal; faktor eksternal yang membuat ketegasan segregasi adalah adanya pengkategorian hubungan antara pendatang-penduduk asli: *krama desa*, *krama tamu* dan *tamui*, yang dibuat oleh Pesamuan Agung MDP Bali.

Kedua, faktor yang paling berperan terhadap terjadinya segregasi ruang sosial antara pendatang dengan penduduk asli adalah lembaga desa *pakraman* itu sendiri. Desa *pakraman* sebagai suatu kelompok kecil komunitas mengikat warganya dalam suatu kesatuan teritorial, kesatuan spiritual dan kesatuan warganya. Kesadaran ini dibangun atas tuntutan berbagai kegiatan suka-duka dan kegiatan upacara yang menuntut adanya kebersamaan dan tanggungjawab warganya.

Ketiga, dampak segregasi ruang sosial terhadap spasial adalah terbentuknya simpul –simpul konsentrasi kegiatan (*multi-nodes*) pada *banjar-banjar* dan di sepanjang koridor jalur prosesi keagamaan. Fenomena ini merupakan ciri dan karakter yang mestinya diperhatikan dalam perencanaan spasial.

Artikel ini hanya membahas hubungan antara masyarakat yang bergenealogis sama dan dampaknya terhadap spasial. Juga lingkup area kajian yang terbatas pada kompleks Perumahan Padang Galeria Denpasar Barat. Diharapkan ada kajian lanjutan yang mencermati fenomena hubungan mobilitas penduduk dengan spasial dalam berbagai konteks dan berbagai hirarki spasial. Demikian halnya pendekatan yang dilakukan lebih condong ke deskripsi kualitatif disesuaikan dengan dominasi pendekatan pada *Jurnal Kajian Bali*, sehingga membuka peluang peneliti lain untuk menggunakan analisis faktor (bahkan analisis SEM) yang bersifat kuantitatif untuk jurnal lainnya.

### Ucapan Terima Kasih

Terwujudnya artikel ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih kami tujukan kepada Bapak Putu Tirta Yasa, ketua RT Perumahan Padang Galeria dan bapak I Wayan Sukrayasa ST., MT sebagai mantan Ketua RT yang telah banyak memberikan informasi dan data. Juga kepada dr. Ken Wirasandi yang sambil berobat setuju untuk diwawancarai di tempat prakteknya. Tidak lupa kepada Sekertaris Desa Padang Sambian Klod, Bapak I Nengah Mada. Rekan sejawat Prof. Dr. I

Ketut Sudibia, SE.,SU. dan I Gusti Agung Bagus Suryada, ST.,MT. yang telah meminjamkan dan memberikan buku yang berkaitan dengan artikel ini. Kepada mahasiswa IB Gde Arisudana Yoga yang telah membantu menggambar Peta. Kepada kedua *reviewer* anonim dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Daftar Pustaka

- Amizeko.2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penduduk Kota Pariaman Menjadi Migran Sirkuler di Kota Padang*. Skripsi Fak.Ekonomi Unand
- Becker, Lawrence C. 1990. *Reciprocity*.Chicago: University of Chicago Press.
- Broom, Leonard and Selznick, Philip. 1984. *Essentials of Sociology* (3<sup>rd</sup> edition). London: F E Peacock Pub.
- Carmona, Matthew, et al.2008. *Public Space: The Management of Dimension*. New York: Rutledge.
- Damayana, IW. 2011. "Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali". Desertasi, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana.
- de Waal Martijn and de Lange Michiel. 2016. "Stories about smart cities: how citizen can identify with their city". *The Mobile City: Mobile Media and Urban Design*. 9 March 2016
- Dupont, Veronique. 2004. "Socio-spatial differentiation and residential segregation in Delhi: a question of scale?", *Elsevier, Geoforum* 35 (2004) 157 – 175.
- Fearon, David. 2004. "Georg Simmel: The Sociology of Space". Center for Spatially Integrated Social Science. eScholarship, University of California (PDF version).
- Gde Arsana, IGK, Suci, Ni Ketut, Suci, I Nyoman, Darmika, IB. Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Keekerabatan di Daerah Bali. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gillin, John Lewis and Gillin, John Philip. 1942. *An Introduction to Sociology*. (digital version 2006). Macmillan.
- Homans, George Caspar. 1991. *The Human Group*. NY: Transaction Publishers.
- Keputusan Pesamaan Majelis Desa *pakraman* Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pesamaan

Agung Pertama MDP Bali, tertanggal 3 Maret 2006

K. Suwondo.2011. “Membali di Lampung” Studi Kasus Identitas Kebalian di Desa Balinuraga, Lampung Selatan.

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/729/4/D\\_902008001\\_BAB%20III.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/729/4/D_902008001_BAB%20III.pdf)

Levebvre, Henri. 1974. *La production de l'espace*. Disunting ulang tahun 2015 oleh Universite d'Aubagne (resume dalam bahasa Prancis dalam format PDF).

Macionis, John J. 2002. *Sociology: a Global Introduction with Classic and Contemporary Readings in Sociology*. (4<sup>th</sup> edition). London: Prentice-Hall.

Mantra. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Noorloos, Femke van, and Steel, Griet. 2015. “Lifestyle migration and socio-spatial segregation in the urban (izing) landscapes of Cuenca (Ecuador) and Guanacaste (Costa Rica)”, *Elsevier, Habitat International xxx* (2015) 1 – 8

Peach,C. 2012. *Residential Segregation: Race and Ethnicity*. UK: Elsevier.

Penduduk Bali Meledak: Migran Mengalir, Krama Bali Transmigrasi. <http://ardinbali.org/news-detail.php?kodeberita=1067>, Jumat, 01 April 2011

Rustariyuni, Surya Dewi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Migran Melakukan Mobilitas Non Permanen ke Kota Denpasar. *PIRAMIDA Vol. IX No. 2 : 95 – 104*, Desember 2013, ISSN : 1907-3275

Sanoff, Henry. 1990. *Participatory Design: Theory & Techniques*. North Carolina: Henry Sanof.

Syamsuddin, Muhammad. 2007. “Agama, Migrasi dan Orang Madura”. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VIII, No. 2 Desember 2007:150-182

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Short, John R., 1984. *An Introduction to Urban Geography*. London: Routledge & Kegan Paul.

Sudibia, IK. *Kecenderungan Pola dan Dampak Migrasi Penduduk di Provinsi Bali Periode 1985 – 2005*. [ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/download/3015/2173](http://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/download/3015/2173). Tahun 2011.

Sudhana Astika, Ketut. 1997. *Konsepsi Tri Hita Karana dalam kehidupan anggota Banjar di Kotamadya Denpasar: suatu analisis deskriptip tentang nilai dan makna keseimbangan dalam kehidupan masyarakat kota*. Thesis

Universitas Indonesia.

- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa pakraman dan Desa dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Suriani. 2014. *Studi Mobilitas Sirkuler Penduduk Desa Salajo Kabupaten Gowa (Kasus Migran di Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan di Kota Makassar)*. Prodi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
- Sidanius, Jim dan Pratto, Felicia. 2001. *Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression*. 1st Edition. Cambridge University Press.
- Sudantra, I Ketut. tt. Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa *pakraman*. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/viewFile/2970/2128> Akses 15 Agustus 2016.
- Young, Kimball and Mack, Raymond W. 1959. *Sociology and Social Life*. (PDF). NY: American Book Company
- Yuliatika, Sari. 2015. Hubungan Antara Penglaju (*Commuter*) dengan Tingkat Manifestasi Kebersamaan (Studi di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu). Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.